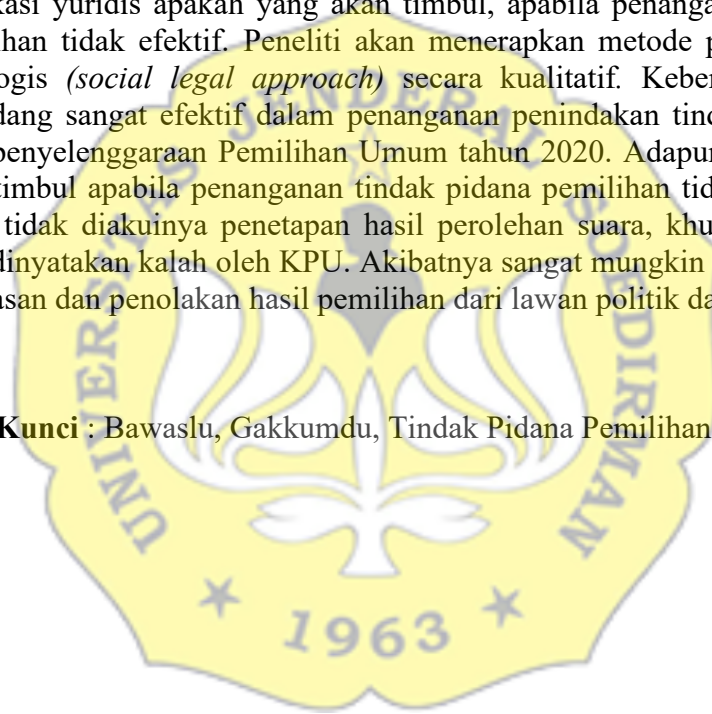


RINGKASAN

Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu, seiring perubahan kebijakan pembuat undang-undang, tentu masih memerlukan sejumlah penyempurnaan termasuk agenda pencarian bentuk terbaik dari badan ini, baik dari segi sistem keorganisasian, pelaksanaan setiap tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, termasuk dalam hal ini efektivitas lembaga dalam menangani tindak pidana pemilihan. Pada pilkada tahun 2020 lalu, Bawaslu Kabupaten Purbalingga sebagai *locus delicti* yang menjadi objek dalam penelitian ini, telah meregister 17 temuan dan laporan dugaan tindak pidana dari sejumlah kalangan termasuk tim pemenangan Pasangan calon Bupati-Wakil Bupati dan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah Proses Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga efektif dan Implikasi yuridis apakah yang akan timbul, apabila penanganan tindak pidana pemilihan tidak efektif. Peneliti akan menerapkan metode pendekatan yuridis sosiologis (*social legal approach*) secara kualitatif. Keberadaan Gakkumdu dipandang sangat efektif dalam penanganan penindakan tindak pidana Pemilu pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2020. Adapun implikasi yuridis yang timbul apabila penanganan tindak pidana pemilihan tidak berjalan efektif yakni tidak diakuinya penetapan hasil perolehan suara, khususnya oleh pihak yang dinyatakan kalah oleh KPU. Akibatnya sangat mungkin memunculkan aksi kekerasan dan penolakan hasil pemilihan dari lawan politik dan simpatisan.

Kata Kunci : Bawaslu, Gakkumdu, Tindak Pidana Pemilihan



SUMMARY

Bawaslu as the supervisor of election administration, along with changes in law-making policies, of course still requires a number of improvements including an agenda for finding the best form of this body, both in terms of organizational system, implementation of each task and function effectively and efficiently, including in this case the effectiveness of the institution in dealing with electoral crimes. In the 2020 regional elections, the Purbalingga Regency Bawaslu as the locus delicti which is the object of this research, has registered 17 findings and reports of alleged criminal acts from a number of circles including the winning team for the Regent-Deputy Regent candidate pair and the community. The purpose of this research is to find out whether the Election Criminal Law Enforcement Process by Bawaslu of Purbalingga Regency is effective and what juridical implications will arise, if the handling of election crimes is not effective. The researcher will apply a sociological juridical approach (social legal approach) qualitatively. The existence of Gakkumdu is seen as very effective in handling election criminal offenses in the holding of the 2020 General Elections. As for the juridical implications that arise if the handling of election crimes is not effective, namely the determination of the results of vote acquisition is not recognized, especially by the party declared to have lost by the KPU. As a result, it is very possible to bring up acts of violence and rejection of election results from political opponents and sympathizers.

Keywords: *Bawaslu, Gakkumdu, Election Crime*

